

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahim, et al. (2015). *Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan*. Malang: Intrans Institute.
- Achmad Ali. (2008). *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adam Chazawi, (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bachsan Mustafa. (2016). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Sugeng Rukmono, (2016). *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, B. A. (2012). *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Paisol Burlian, (2015). *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono (2014), *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dinitto M, D. (2000). *Social welfare, pplyics and public policy*. Boston: Allyn & Bacon.
- Djernih Sitanggang. (2018). *Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Henry Indraguna dan Kayaruddin Hasibuan, (2020), *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi Kaidah Hukum dan Doktrin-Doktrin Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Tras Mediacom.
- Hoefnagels, G. (1972). *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, I. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Jur Andi Hamzah. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia &Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia.
- _____. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2017). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K Petta Lolo. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2006). *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- M. Friedman, L. (1984). *American Law an Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang :Undip.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, N. (2015). *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rodliyah dan Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Saleh, K. (1983). *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2008) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal

Azhari dan M. Fajrin, Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana / *Penal Policy* Sanksi Pidana Mati di Indoneasi, Volume 3, Res Judicata, 2020.

Arhjayati Rahim, Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, *Journal Al-Himayah*, Nomor 1, 2019.

Cecep Cahya Supena, *Manfaat penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*, Volume 8, *Jurnal Moderat*, 2022.

Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Volume 12, Kertha Wicaksana, 2018.

Fadly Andrianto, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, Volume 3, *Administrative Law & Governance Journal*, 2020.

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Volume 59, *Jurnal Warta*, 2019.

Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Volume 2, *Jurnal Hukum*, 2016.

Indri Hadisiswati, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*, Volume 2, *Ahkam*, 2014.

Intan Timur, *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Kasus Korupsi*, Volume 4, *Jurnal Riset Bisnis*, 2021.

Made Dudy Satyawa Khusna, *Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti menurut Hukum*, Volume 8, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2017.

M. Imam Rosada, Utang Rosidin, Ikhwan Aulia Fatahilah, *Kewenangan Jaksa Dalam Menghitung Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (TPIKOR) Dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print - 05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 Hubungan Dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016*, Volume 3, Varia Hukum, 2021.

Roby Satya Nugraha, *Penjatuhan Hukuman Mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara*, Volume 06, Palar (Pakuan Law Review), 2020.

Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Volume 1, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012.

Syafruddin Makmur, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural*, Volume II, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Tahun, 2015.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Volume 14, Jurnal Dinamika Hukum, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 10 Juni 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi